

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bank Indonesia melalui PBI No. 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sistem Keuangan (LAPS SK), mempertegas kewenangannya dalam mengatur dan menjaga stabilitas sistem pembayaran serta melindungi konsumen dalam transaksi keuangan. Hal ini melengkapi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah menetapkan LAPS SJK sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dalam konteks sistem pembayaran, Bank Indonesia menangani sengketa yang berkaitan dengan transfer dana, alat pembayaran elektronik, dan layanan sistem pembayaran lainnya, sementara OJK lebih fokus pada pengawasan mikroprudensial, termasuk perlindungan konsumen perbankan. Dengan adanya LAPS SK, BI dapat memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terfokus pada aspek sistem pembayaran, menciptakan kepastian hukum dan mengurangi tumpang tindih kewenangan antara BI dan OJK. Harmonisasi antara PBI No. 3 Tahun 2024 dan regulasi OJK menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas penyelesaian sengketa, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional..
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa sistem pembayaran di Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Sebagai respons terhadap perubahan ini, Bank Indonesia (BI) telah mengembangkan regulasi perlindungan konsumen melalui beberapa Peraturan



Bank Indonesia (PBI), termasuk PBI No. 3 Tahun 2023 dan PBI no 3 tahun 2024 yang memperkenalkan penyelesaian sengketa melalui LAPS-SK. LAPS-SK berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyelenggara sektor keuangan dengan cara yang cepat, efisien, dan transparan, melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. LAPS-SK juga bekerja sesuai dengan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menangani sengketa, memberikan konsultasi, serta mengembangkan layanan penyelesaian sengketa di sektor keuangan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh LAPS-SK bertujuan untuk memberi solusi yang lebih terjangkau dan transparan, dengan mengurangi ketergantungan pada jalur pengadilan. Selain itu, LAPS-SK beroperasi di bawah pengawasan Bank Indonesia, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil lembaga ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebelumnya, OJK juga telah mengeluarkan regulasi serupa, yaitu LAPS SJK, yang menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan, memperkuat peran LAPS-SK dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan efisien.



## **B. Saran**

1. Untuk menghindari pembentukan lembaga baru dan mengurangi tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disarankan untuk memperluas kewenangan LAPS SJK agar mencakup sektor keuangan secara lebih luas, termasuk sistem pembayaran yang sebelumnya diatur oleh BI. Dengan cara ini, LAPS SJK yang kini beroperasi di bawah pengawasan OJK dapat menangani seluruh sengketa di sektor keuangan, termasuk yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Hal ini akan menciptakan mekanisme

penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi dan efisien tanpa perlu membentuk lembaga baru. Kolaborasi yang lebih erat antara BI dan OJK dalam pengawasan dan penerapan regulasi ini dapat memastikan keadilan, efisiensi, dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat.

2. Untuk memastikan LAPS-SK dapat bekerja dengan optimal, perlu dilakukan penguatan kedudukan lembaga ini dalam menangani sengketa yang terkait dengan transaksi sistem pembayaran. LAPS-SK perlu meningkatkan aksesibilitas layanan penyelesaian sengketa untuk konsumen dan penyelenggara sistem pembayaran melalui mekanisme alternatif yang cepat dan transparan seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain itu, untuk mendukung peran LAPS-SK, penting untuk memastikan keberlanjutan pelatihan bagi mediator dan arbiter, serta meningkatkan koordinasi dengan BI dan OJK guna mengatur peraturan yang relevan untuk penyelesaian sengketa yang sesuai dengan dinamika sektor pembayaran yang berkembang pesat.

